

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jala Permata Aksara.
- Nadapdap, B. (2020). *Hukum acara persaingan usaha pasca-putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana.
- Nadapdap, B. J., & Amsori. (2025). *Mengenal politik hukum: Suatu pengantar*. Alfabeta Indonesia.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement* (E. Kelly, Ed.). Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Wahyono, P. (1986). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*. Ghalia Indonesia.
- Widiarty, W. S. (2021). *Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen*. Refika Aditama.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.

B. Jurnal, Laporan, dan Dokumen Akademik

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik UMKM Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan stabilitas sistem keuangan 2022*. Bank Indonesia.
- Dewan Nasional Pengembangan UMKM. (2022). *Perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia*. Dewan Nasional Pengembangan UMKM.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. (2024). *Profil UMKM Kota Depok 2024*. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok.
- Ermalia, T. L. (2016). Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Publika*, 4(2).
- Indra, S. (2021). Masalah akses pembiayaan pada UMKM di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(2), 50.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2022*. Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
(2023). *Rencana aksi transformasi digital UMKM 2021-2024*.
Kementerian Koperasi dan UKM.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro*.

Pemerintah Kota Bandung. (2023). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro*.

Pemerintah Kota Depok. (2012). *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Pemerintah Kota Depok. (2023). *Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 85*

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pemerintah Kota Depok. (2024). *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

Pemerintah Kota Depok. (2024). *Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman untuk Usaha Mikro.*

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.*

D. Sumber Internet dan Media Online

Bank Indonesia. (2024, Agustus 5). *Transformasi digital dorong UMKM menembus pasar global.* https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2616224.aspx

Bintonnadapdap. (n.d.-a). *Video dokumentasi penelitian lapangan UMKM Teras Malioboro* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@bintonnadapdap/video/7513734829163384069?_r=1&_t=ZS-8ySXghMIIQH

Bintonnadapdap. (n.d.-b). *Video dokumentasi penelitian lapangan UMKM Teras Malioboro* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@bintonnadapdap/video/7513743203514780934?_r=1&_t=ZS-8ySY04xj0ok

Binton Sukses. (n.d.-a). *Wawancara pelaku UMKM di Car Free Day pertama di Depok* [Video]. YouTube. Diakses 30 Juli 2025, dari https://www.youtube.com/watch?v=K37_X14AXlo

- Binton Sukses. (n.d.-b). *Program pemutihan kredit macet* [Video]. YouTube. Diakses 28 Juli 2025, dari <https://www.youtube.com/watch?v=LZyPa-9GT3I>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. (n.d.). *Dkerens Kota Depok*. Diakses 13 Juli 2026, dari <https://umkmdkerens.depok.go.id/hubungi>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. (2024). *UMKM Depok berkontribusi 60% PDRB, pemerintah siapkan program dukungan maksimal*. LinkUMKM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*. Diakses 13 Juli 2026, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, Oktober 28). *Berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah dorong akselerasi adopsi teknologi digital oleh UMKM*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4662/berperan-dalam-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong-akselerasi-adopsi-teknologi-digital-oleh-umkm>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Februari 27). *KUR Super Mikro merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM pemula*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5040/kur-super-mikro-merupakan-wujud-keberpihakan-pemerintah-kepada-pelaku-umkm-pemula>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). *Kredit Usaha Rakyat: Pertanyaan yang sering ditanyakan*. Diakses 13 Juli 2026, dari <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>
- MetroTV News. (2024). *Aplikasi Kantong UMKM perkuat kebijakan subsidi bunga Pemkot Depok*. metrotvnews.com.

OSS Indonesia. (n.d.). *Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi untuk memulai dan menjalankan usaha*. OSS Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK): Informasi debitur*. Diakses 30 Juli 2025, dari <https://www.ojk.go.id>

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, Januari 15). *1.034 pedagang tempati TM baru, proses penataan sudah lama direncanakan*. <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/1034-pedagang-tempati-tm-baru-proses-penataan-sudah-lama-direncanakan>

YouTube. (n.d.). *Penelitian lapangan penulis di Shelter Manahan Solo* [Video]. Diakses 25 Juli 2025, dari <https://www.youtube.com/watch?v=egtL511kFRY>

E. Sumber Primer dan Wawancara

Ade Supriyatna. (2025, Mei 7). *Wawancara pribadi oleh penulis dengan Ketua DPRD Kota Depok*.

Hamzah. (2025, Mei 7). *Wawancara pribadi oleh penulis dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Depok*.

Jeffrey Wurangian. (2025, Juli 28). *Wawancara oleh penulis mengenai PP Nomor 47 Tahun 2024 dan program pemutihan kredit macet*.

Mohamad Thamrin. (2025, Mei 7). *Wawancara pribadi oleh penulis dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok*.

Pelaku UMKM di Kecamatan Cimanggis, Depok. (2025, Juli 10). *Wawancara pribadi oleh penulis*.

Pelaku UMKM Teras Malioboro, Yogyakarta. (2025, Juni 22). *Wawancara pribadi oleh penulis*.

Penulis. (2025, Juni 9). *Penelitian lapangan di Teras Malioboro, Yogyakarta*.

Penulis. (2025, Juli 25). *Penelitian lapangan di Shelter Manahan Solo*.

Supian Suri. (2025, Mei 7). *Wawancara pribadi oleh penulis dengan Wali Kota Depok*.